

DESKRIPSI HKI

Karya ilmiah ini membahas peran kehadiran Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Jawa Timur dalam mendukung penegakan hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Madiun. Pembahasan berangkat dari kondisi wilayah Madiun yang memiliki berbagai potensi gangguan keamanan, seperti konflik antarkelompok atau perguruan pencak silat, unjuk rasa, serta kebutuhan pengamanan objek vital. Penelitian mengkaji kedudukan Brimob sebagai satuan khusus Polri dan bentuk keterlibatannya dalam mendukung tugas kepolisian kewilayahan, khususnya pada situasi yang memiliki tingkat risiko tinggi. Bentuk keterlibatan tersebut meliputi patroli bersenjata, pengamanan objek vital, operasi cipta kondisi, pengamanan kegiatan masyarakat, serta bantuan dalam penanganan konflik sosial dan gangguan keamanan. Kehadiran Brimob juga dikaji dari dampaknya terhadap stabilitas keamanan dan efektivitas penegakan hukum di wilayah Madiun. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Brimob memiliki peran strategis sebagai kekuatan pendukung Polres dalam menghadapi gangguan keamanan berintensitas tinggi. Sinergi antara Brimob dan kepolisian kewilayahan dinilai dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mempercepat respons terhadap potensi gangguan keamanan. Karya ilmiah ini juga menekankan pentingnya koordinasi, pendekatan persuasif, dan tindakan humanis untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2. Jakarta.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian*. Jakarta: Markas Besar Polri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengendalian Massa (Dalmas)*. Jakarta: Markas Besar Polri.

